

## **Menatap Arah Reformasi Politik Indonesia**

**Mohammad Fajrul Falaakh**

HIRUK-pikuk arus reformasi di Indonesia selama tahun 1998, sejauh ini telah menghasilkan sejumlah capaian dan korban politik.

Selebihnya, dengan berbagai sikap dan keanekaragaman pandangan, terdapat pula arah-arah tertentu dalam melanjutkan reformasi tersebut.

Secara umum tulisan ini hendak menggarisbawahi sejumlah capaian penting dan titik-titik arah reformasi tersebut, khususnya untuk menuju pemilihan umum (pemilu) dan pembentukan pemerintahan baru pasca-Pemilu 1999. Diskusi dimulai dengan menilik kembali perjalanan 'gelombang reformasi' selama tahun 1998.

Krisis moneter 1997 yang berlanjut menjadi krisis ekonomi telah menjadi konteks penting bagi gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa Indonesia. Pada mulanya gerakan mahasiswa Indonesia tampak tertinggal dalam menanggapi kemerosotan ekonomi yang terjadi di negerinya. Di Thailand dan Korea Selatan, dua negara yang mengalami krisis hampir bersamaan dengan Indonesia, gerakan mahasiswa tampak lebih sigap mengelola isu krisis moneter sebagai isu gerakan politik mereka.

Akibatnya, di tahun 1997 mahasiswa Thailand berhasil mendesak PM Chavalit Yongchaiyudh untuk digantikan oleh PM Chuan Leekpai, yang sekaligus harus berjanji untuk melakukan perbaikan ekonomi dan melakukan demokratisasi lebih jauh. Di Korea Selatan, Presiden Kim Young-sam didesak untuk tidak mencalonkan diri lagi dalam Pemilu 1997, dan tokoh pembangkang Kim Dae-jung berhasil dimunculkan sebagai pemimpin alternatif untuk negeri ginseng itu. Dengan menyebut keberhasilan ini, tidak berarti bahwa mahasiswa di kedua negara itu berperan sendirian. Justru sebaliknya, politik institusional juga berlaku melalui peran partai-partai politik, parlemen dan pemilu, di samping konteks krisis ekonomi.

\*\*\*

Di Indonesia, pada awalnya mahasiswa tampak gagap menanggapi isu ekonomi-politik yang berdimensi internasional itu. Mahasiswa Indonesia baru sigap ketika langkah Presiden Soeharto dalam 'meladeni' resep-resep IMF (Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia terlihat jelas 'kedodoran.' Begitulah, tuntutan reformasi ekonomi digelindingkan pada tahap-tahap awal aksi demonstrasi di berbagai kampus di Indonesia, meskipun sudah dipastikan bahwa Presiden Soeharto akan dipilih lagi oleh Sidang MPR, Maret 1998, untuk menjadi presiden Indonesia periode 1998-2003.

Rupanya kemantapan pemilihan kembali Presiden Soeharto tidak diimbangi oleh ketangguhannya dalam menangani krisis ekonomi. Bahkan, penempatan anggota kabinetnya dinilai sangat kental dengan pertimbangan 'koncoisme' dan bersifat personal. Akibatnya, wacana reformasi (ekonomi) meluas menjadi tuntutan reformasi menyeluruh.

Namun perluasan wacana ini belum mampu menekan Presiden Soeharto untuk mendengar tuntutan mahasiswa dan masyarakat luas.

Agak aneh sebetulnya, wacana reformasi lantas tereduksi menjadi tuntutan agar Presiden Soeharto (dan keluarganya) turun dari panggung politik Indonesia. Demikianlah, tuntutan itu menguat selama minggu-minggu terakhir bulan April hingga bulan Mei 1998. Banyak tokoh masyarakat pun asyik 'menari-nari' di atas gelombang gerakan mahasiswa Indonesia.

Diperkeruh oleh suasana kerusuhan di sana-sini, akhirnya tuntutan mahasiswa memuncak dalam bentuk pendudukan gedung MPR/DPR. Dipertajam oleh permainan politik faksi-faksi di parlemen Indonesia, ditambah oleh sikap ABRI yang 'terpaksa' bertindak di jalur konstitusional, dan 'pukulan dari dalam' berupa pembelotan empat belas anggota kabinetnya, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan yang praktis telah didudukinya selama sekitar tiga dasawarsa.

Sesuai dengan institutional arrangement yang berlaku, Wapres BJ Habibie menggantikan sebagai presiden. Sejak awal Habibie mengatakan akan melanjutkan reformasi, meskipun susunan anggota kabinetnya tak memuaskan banyak pihak. Tetapi, belakangan karena pertimbangan legitimasi politik, ia terpaksa menjanjikan penyelenggaraan pemilu yang dipercepat.

Sebagai konsekuensinya, pendirian partai-partai politik baru harus dibiarkan. Setelah itu, proses liberalisasi politik ia lakukan. Ia membebaskan sejumlah narapidana dan tahanan politik dan memberikan kebebasan kepada media massa. Sekarang, awal 1999, liberalisasi itu berlanjut dengan pembebasan tahanan politik dan narapidana politik yang lain serta rencana penghapusan UU Subversi Tahun 1963.

Tidak berarti bahwa semua itu merupakan capaian reformasi yang bersih. Pemerintahan transisional Habibie telah ternoda oleh jatuhnya korban mahasiswa dan penangkapan sejumlah tokoh oposisi di sekitar Sidang Istimewa MPR bulan Mei 1998. Selain itu, kondisi perekonomian belum juga pulih, investasi asing bahkan merosot lebih dari lima puluh persen, dan ketegangan sosial serta penjarahan-yang mencerminkan tidak adanya penghormatan terhadap otoritas-juga merajalela.

\*\*\*

PASCA-SI MPR 1998, agenda reformasi ke depan jelas terpusat kepada pemilu. Ini tidak berarti, bahwa agenda pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah, pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan penciptaan pemerintahan yang bersih maupun pemulihan ekonomi, harus menunggu pemilu. Secara praktis tampaknya tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Habibie, kecuali melancarkan paket Bank Dunia berupa program jaring pengaman sosial (*social safety net*), restrukturisasi utang dan pembenahan perbankan, serta secara serius menyiapkan pemilu yang bersih, jujur, adil dan terbuka pada tahun 1999.

Pemilu tampak menjadi titik awal bagi pembenahan politik (dan ekonomi) yang lebih mapan dan menyeluruh. Dalam pidato di depan DPR, 5 Januari 1999, Presiden Habibie menekankan netralitas ABRI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kehidupan kepartaian dan pemilu yang akan datang. Ia juga

menyatakan keterbukaan pemerintahannya terhadap pemantauan independen oleh berbagai kalangan, serta bantuan dunia internasional untuk penyelenggaraan pemilu tersebut.

Dari pemilu itulah pemerintahan baru yang legitimate akan ditetapkan oleh partai-partai pemenang pemilu bulan Juni 1999. Tetapi hal ini bukan perkara yang mudah. Ketegangan dan kekerasan sosial-politik menjelang pemilu harus dapat dikurangi, bahkan dihentikan, kebutuhan dasar rakyat banyak harus dapat dipenuhi, dan tingkat tertentu konsensus politik baru harus sudah dapat diperkirakan bersama.

Jika tidak, kegagalan pemilu merupakan bayangan yang dapat menjadi kenyataan. Berhasilnya pemilu juga masih membuka peluang bagi terjadinya proses politik yang berlarut-larut, jika partai-partai pemenang pemilu tak dapat mencapai konsensus politik. Ini bukanlah kemustahilan, mengingat bahwa selama Orde Baru kekuatan masyarakat sipil dan partai-partai politik tidak dibiasakan untuk mengalami konflik politik secara terkendali maupun berusaha mencapai konsensus politik yang genuine (sejati).

\*\*\*

Persoalan lain yang juga membayangi pasca-Pemilu 1999 adalah sikap terhadap warisan rezim Orde Baru, baik berupa budaya dan sistem politik lama maupun segala tindakan praktis yang telah dilakukan dan personel birokrasi yang masih ada. Akan diapakan semua itu? Politik penghancuran (*politics of destruction*) sempat disinggung sementara kalangan sebagai 'kebiasaan politik Indonesia,' yang dapat dipilih oleh rezim baru.

Namun memilih sikap ini akan menambah luka bersama, yang dampaknya akan dirasakan tidak menguntungkan bagi pendewasaan sebuah bangsa.

Pilihan lain adalah cara bangsa Jerman untuk menyatu kembali, begitu juga kerinduan bersama antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Bahkan, pola Afrika Selatan pasca-rezim apartheid dengan komisi pencarian fakta, kebenaran dan rekonsiliasi yang dipilih Nelson Mandela, dapat pula dijadikan referensi. Pilihan kedua inilah yang menjadi asumsi usulan 'rekonsiliasi nasional' yang dicuatkan KH Abdurrahman Wahid belum lama berselang. Jalan ini juga dapat digunakan pada kasus-kasus Aceh, Lampung, Tanjungpriok, dan Timor Timur.

Tampak bahwa meniti proses politik menuju pemilu dan membangun kehidupan bernegara pasca-Pemilu 1999 tetaplah tidak sederhana. Apa lagi dengan mengingat, bahwa beberapa agenda besar lain juga menunggu pilihan jalan penyelesaiannya; reorientasi pembangunan nasional untuk mengangkat nasib mayoritas rakyat-yang selama ini hanya mengenyam sepuluh persen pendapatan kotor nasional (GDP), sekaligus mampu membawa bangsa Indonesia menghadapi tantangan liberalisasi perdagangan. Demikian pula dengan agenda demokratisasi dan pemulihan kedaulatan rakyat ke dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara (*governance*), serta pengembalian supremasi hukum di atas kepentingan politik parokial. (Sumber: *Kompas*, 18/1/1999, Hal. 4)